**IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT YANG DITERAPKAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B RENGAT**

Oleh : Hilda Febriani

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln. Alahmanda Mapoyan Damai, Pekanbaru

Email : hildafebriani.2302@gmail.com Telepon : 0852-7829-6411

ABSTRACT

Implementation of Parole is a coaching program to integrate prisoners and correctional students into community life after fulfilling specified requirements. activities to foster correctional fostered citizens based on systems, institutions and ways of fostering which constitute the final part of the criminal justice system in the criminal justice system for fostered citizens in detention centers in the IIB Rengat state already run the proper process in the penitentiary concept to foster fostered citizens to be better. Based on this understanding, the writer of this thesis formulates two problem formulations, namely: first, how is the implementation of conditional release applied in the Class II B Rengat state prison, second, what are the obstacles in the implementation of conditional release in the class II B Rengat state prison

In the research results there are two main problems that can be concluded. First the granting of parole which has not been fulfilled according to applicable law. These two obstacles are still obstacles for prisoners who apply for parole

This study uses an approach. This research is a sociological legal research, which is a study of the effectiveness of existing laws or research on legal identification. This means that reviewing the state of the problem in the field is related to the legal aspects that apply in the community and governing the problem. Because in this study the writer directly conducts research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. in terms of its nature, this research is made Descriptive, namely research that describes various facts and facts contained in social life in depth.

Keywords: Implementation, Parole, Detention Center

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembebasan Bersyarat merupakan Program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik masyarakat ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹ Syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat di dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam pasal 82 huruf a yaitu:

“Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan”.

Untuk mendapatkan fasilitas bebas bersyarat, seorang narapidana harus dulu mengajukan permohonan alurnya dimulai dari Lembaga Perasyarakatan, kemudian ke Kanwil, hingga Ditjenpas. Dalam permohonan itu Wali narapidana mengajukan dengan mencantumkan nama narapidana untuk kemudian digelar sidang TPP dan hasil sidang diterima oleh Lapas, 14 hari kerja di Kanwil, 30 hari kerja di Jetpas sejak

persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah TPP.²

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga pidananya tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan. Demikian yang dikatakan demikian yang dikatakan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.³

Berdasarkan Pengamatan Peneliti terhadap beberapa kasus diberikan oleh Kasubsi pelayanan tahanan di rumah tahanan negara klas II B Rengat dari 2016-2017 berupa teguran dan pemberian sanksi tertentu. Narapidana pembebasan bersyarat yang melakukan tindak pidana. Berikut data kasus narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana sepanjang tahun 2016 sampai 2017 dibawah ini:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Bebas Bersyarat Di
Rumah Tahanan Negara
Klas II B Rengat

N o	Tahun	Yang mendaftar untuk pembebasan bersyarat	Yang mendapat pembebasan bersyarat
1.	2016	63	26
2.	2017	110	77
3.	2018	61	54
Jumlah		234	157

Sumber Data:Rutan Klas II B Rengat dari tahun 2016 sampai 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya kasus

¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

² Hukum Online, Di Akses 07/02.2019 www.hukumonline.com

³ Ibid

tindak pidana yang diberikan pembebasan bersyarat oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat. Pada tahun 2016 yang mendaftar untuk pembebasan bersyarat (63 orang) dan yang mendapat pembebasan bersyarat hanya (26 orang). Pada tahun 2017 yang mendaftar untuk pembebasan bersyarat (110 orang) dan yang mendapat pembebasan bersyarat hanya (77 orang). Pada tahun 2018 yang mendaftar untuk pembebasan bersyarat (61 orang) dan yang mendapat pembebasan bersyarat hanya (54 orang). Salah satu kasus yang diberikan pembebasan bersyarat adalah kasus pemerkosaan antara seorang paman terhadap keponakannya, dimana dilakukan oleh AT (55 Tahun) terhadap AM (10 Tahun) dimana AT adalah paman dari AM dan telah melakukan pemerkosaan terhadap AM sehingga pihak keluarga melaporkan AT Kepolisian dan tidak mengakui AT Sebagai pihak keluarganya lagi sehingga tidak ada penjamin terhadap AT. Pihak Rutan telah memberikan pembebasan bersyarat kepada AT, tetapi AT mendapat pembebasan bersyarat dari pihak Rumah Tahanan Negara.

Menurut Kepala sub bagian seksi pelayanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Rengat Bapak Rudinur,SH. Narapidana yang belum dibebaskan akan tetapi sudah mendapatkan pembebasan bersyarat dinilai belum menunjukkan perubahan yang baik dalam bertingkah laku selama didalam masa binaan dirumah tahanan negara oleh sebab itu, harus diberi binaan lagi agar tidak melakukan tindak pidana ketika dia sudah dibebaskan. Hal ini

tentunya membuat implementasi pembebasan bersyarat ini tidak stabil dan meningkat setiap tahunnya.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi motivasi bagi penelitian adanya hambatan-hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat. Bagi narapidana di rumah tahanan negara kelas II B Rengat. Fokus dari penelitian ini adalah mencari penyebab serta mencari penyebab dan memberi saran atas permasalahan yang terjadi. Kemudian dinaskahi dalam proposal/skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembebasan Bersyarat Yang Diterapkan Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi pembebasan bersyarat yang diterapkan di Rumah tahanan negara kelas II B Rengat?
2. Apakah kendala dalam Implementasi pembebasan bersyarat di rumah tahanan negara kelas II B Rengat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembebasan bersyarat yang di Rumah tahanan negara di daerah rengat menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018
- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pembebasan bersyarat di rumah tahanan negara di daerah Rengat

⁴Wawancara dengan Bapak Rudinur, SH, Kepala Sub bagian seksi pelayanan tahanan kemasyarakatan kelas II B rengat, *Hari jum'at, tanggal 23 februari 2018, Jam 08.30 Wib*, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Rengat.

menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai apa saja yang berhubungan dengan penerapan implementasi pembebasan bersyarat yang di rumah tahanan negara di daerah Rengat menurut dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018
- b. Untuk memberikan sumbangan saran ilmu pengetahuan bagi aktivitas Akademis Universitas Negeri Riau, instansi maupun masyarakat dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Implementasi pembebasan bersyarat yang diterapkan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu

keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Keadilan adalah tujuan yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum didunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.

2. Konsep Perasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵ Sedangkan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak Negara dan bimbingan klien kemsyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan

⁵ Ketentuan Umum Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

⁶ Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.135.

hingga kebijakan korektif bersangkutan.⁷

2. Pembebasan Bersyarat adalah Program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik masyarakat ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁸
3. Diterapkan adalah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.
4. Rumah tahanan negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu sesuatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

⁷ Thomson Reuters, *State implementation plans for national primary and secondary ambient air quality standards*, 2018

⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, tanggal, 20 juli 2018

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat, mengingat adanya permasalahan dalam Implementasi pembebasan bersyarat yang diterapkan di rumah tahanan negara Klas II B Rengat

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah :

- 1) Kasubsi Pelayanan Tahanan
- 2) Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara
- 3) Kasubsi Pengelolaan Badan masyarakatan
- 4) Narapidana yang mendaftar pembebasan bersyarat
- 5) Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan pilihan.

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode Wawancara (*Interview*) dan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

6. Analisis Data

Data dan bahan yang diperoleh dari peneliti, penulis akan mengolah, menyusun, dan

menganalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Setelah bebas dari lapas selain dibebani oleh beberapa syarat, narapidana juga diberikan tambahan masa percobaan selama setahun dan langsung ditambahkan pada sisa pidananya.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Proses pembedaan menjadi penentu seseorang dapat dinyatakan sebagai narapidana atau tahanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUP) pada pasal 1 butir 31, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.¹²

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.¹³

3. Hak Narapidana

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;

¹¹ Pasal 1 butir 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

¹³ B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang tertib dan tentram.¹⁴ Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.¹⁵

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif. Relatif dalam artian adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Melihat hal demikian berarti keadilan hanya bisa didapatkan oleh satu pihak. Dengan kata lain, keadilan yang sebenarnya

adalah merupakan suatu ketidakadilan.

Sedangkan menurut Subekti sebagaimana dikutip Kartini Sari Handayani, keadilan kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati setiap orang dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹⁶

Keadilan menurut Aristoteles sebagaimana dikutip Frans Hendra Winata, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*Audi et Alteram Partem*). Jika orang yang mampu daapt dibeli advokat makan orang miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publicio*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.¹⁷ Pada dasarnya hakikat kebenaran yang hakiki adalah keadilan (*justice*). Menegakkan kebenaran, maka dengan kata lain juga

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.67.

¹⁵ *Ibid*, hlm.68.

¹⁶ Kartini Sari Handayani 'Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (*Acces To Justice*) Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di LBH Pekanbaru-YLBHI)', Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.49.

¹⁷ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publicio: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.2.

menegakkan keadilan. Secara sederhana, hukum yang ditegakkan baru dapat dianggap “benar” atau “adil” apabila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih.

D. Tinjauan Umum tentang Pemasarakatan

1. Pengertian Pemasarakatan

menurut Depertemen kehakiman Republik Indonesia permasyarakatan adalah bagian dari peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidanaan, anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarkat yang baik.¹⁸

2. Sistem Pemasarakatan

Sistem pemasarakatan yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Undnang-Undang Nomor 19 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan ke sistem masyarakat.¹⁹

Tujuan diselenggarakan nya sistem pemasarakat dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁰

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Keadaan Geografis

a. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8,1928.26 km² (819.826,0 Ha) yang terjadi dari daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Batas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan

1. Sebelah Utara dengan kabupaten pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Bungo tebo (propinsi jambi)
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir²¹

c. Jarak Ibukota Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten

Ibukota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota kecamatan batang peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat

¹⁸ Tolib setiady, *Loc.cit.*

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Op.cit.* hlm. 3.

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

²¹ www.goriau.com/berita/indragiri-hulu/index.html

dengan Ibukota kabupaten adalah ibukota kecamatan Rengat yaitu 0 km.

B. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Rengat Klas II B

1. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat pertama kali didirikan di kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor. 37 Rengat, bangunan yang ditempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1911. Untuk memenuhi kebutuhannya, Rutan Rengat terus berbenah diri, pada tahun 1984 mendapat kucuran dana pembangunan tersebut, Rutan Rengat dipindahkannya pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan Rutan lama. Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat selesai.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat menurut Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:²²

a. Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pelayanan tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Tugas

Melaksanakan

Perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Fungsi

Melaksanakan

pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengolahan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara.

d. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1) Visi

Menjadi insritusi pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan.

2) Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia

²² www.goriau.com/berita/indragiri-hulu/index.html

melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

3. Keadaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat

Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat narapidana pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) Orang, dan pada tahun 2019 jumlah narapidana sebanyak 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang. Di Rutan Klas II B Rengat, dalam hal pengamanan tenaga petugas keamanan belum cukup untuk melakukan pengamanan. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melakukan proses pengamanan terhadap narapidana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi pembebasan bersyarat yang diterapkan di Rumah tahanan negara kelas II B Rengat

Pelaksanaan atau Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan untuk mengajukan Pembebasan bersyarat telah ada pada pasal 14 ayat (1) huruf k yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat untuk penghuni rumah tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimulasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan Program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²³ kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana warga binaan di rumah tahanan Negara sklas IIB Rengat sudah mejalankan proses yang semestinya.

Pembebasan Bersyarat merupakan Hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, Akan tetapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih menjadi persoalan bagi petugas untuk pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di rutan klas IIB Rengat.

pengajuannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada di undang-undang akantetapi belum berjalan dengan semestinya

²³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

Seharusnya petugas rutan klas IIB Rengat berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku. Dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara kepada mantan narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, Pemberian pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya tidak semuanya narapidana dapat memperolehnya. Adanya persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh narapidana dan dipenuhi seorang narapidana agar dalam prosedur dapat diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana itu MA menyatakan bahwa dalam pengajuan dan sampai mendapat surat putusan pembebasan bersyarat sangatlah memakan waktu yang lama MA sendiri menunggu hasil surat putusan sampai 2 bulan bukan hanya membuat MA merasa dirugikan tetapi keluarga MA yang menunggu putusan juga merasa dirugikan. Dalam undang-undang yang sudah dijelaskan bahwa proses untuk pengajuan pembebasan bersyarat hanya memakan waktu yang lama hanya 14 hari kerja Rumah Tahanan Negara, 14 hari kerja dikanwil dan 30 hari kerja di Ditjenpas sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP. Seharusnya petugas rumah tahanan Negara klas IIB Rengat berpedoman kepada undang-undang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sub bagian seksi pelayanan tahanan permasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat. Mengatakan mengapa setiap tahunnya tidak banyak mengajukan permohonan persyaratan untuk

pembebasan bersyarat karena narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara masih belum bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sebagian narapidana yang pernah mengajukan permohonan tetapi belum melengkapi syarat-syarat baik dalam bentuk berkas dokumen maupun dalam bentuk perkelakuan baik saat pembinaan di rumah tahanan Negara. Di dalam pemberian pembebasan bersyarat banyak yang harus di pertimbangkan baik dari rumah tahanan Negara maupun dari instansi-instansi yang berwenang untuk memberi permohonan pembebasan bersyarat. pertimbangan-pertimbangan itulah yang akan memberikan narapidana pemberian pembebasan bersyarat. Saat proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana harus melakukan perbuatan yang baik tidak berkelahi dengan narapidana yang lain maupun membuat kesalahan-kesalahan yang akan memberhentikan proses yang telah berlangsung dan narapidana tersebut tidak akan mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat.

Tabel IV.2

Jawaban Responden Tentang Alasan Narapidana Mengajukan Permohonan Bebas Bersyarat

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (100%)
1	Tidak Tahu Ada Peraturan	7	41,17
2	Tahu Ada Peraturan	10	58,82
Jumlah		17 Orang	

Dari tanggapan responden yang ada pada tabel diatas diketahui bahwa responden, mengatakan alasan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat adalah

sebagian narapidana masih belum mengetahui adanya peraturan yang mengenai permohonan pembebasan bersyarat karena belum mengetahuinya maka beberapa narapidana belum pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan bersyarat sedangkan responden yang mengetahui pernah mengajukan permohonan tetapi tidak di setujui karena masih ada persyaratan-persyaratan yang belum lengkap.²⁴

Dari hasil wawancara dengan kasubsi pelayanan rumah tahanan Negara Klas II B Rengat mengatakan dari 17 orang yang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat yang kelengkapan berkasnya hanya 4 orang sendnagkan yang 13 orang lainnya masih kurang kelengkapannya berkas-berkas yang seharusnya di perlengkapkan sebelum penyerahan kepada pihak-pihak yang yang memproseskan permohonan yang di ajukan oleh pihak narapidana dan pihak keluarga. Karena tidak lengkapnya persyatan-persyaratan yang telah di minta oleh petugas maka permohonan tidak bisa di proseskan sampai di penuhi kembali persyaratan kepada petugas yang memproseskan permohonan pengajuan pembebasan bersyarat.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan masih belum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku masih banyak yang harus diperbaiki baik dari aparaturnegara yang bersangkutan dengan pemberian pembebasan bersyarat maupun

dengan narapida itu sendiri, supaya tidak ada lagi pengaduan-pengaduan tentang pemberian pembebasan bersyarat di Rumah tahanan Negara Klas II B Rengat. Menurut petugas pun masih banyak yang belum bisa mengajukan persyaratan pemberian pembebasan bersyarat dapat dilihat dari tabel-tabel diatas, seharusnya tidak ada lagi alasan yang harus jadi permasalahan baik dari aparaturnegara yang bersangkutan maupun dari narapidana itu tersendiri. Seandainya aparaturnegara yang bersangkutan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku, maka pemberian pembebasan bersyarat seharusnya berjalan dengan semestinya tidak ada lagi alasan-alasan yang harus diterima oleh narapidana yang ada di Rumah tahanan Negara Klas II B Rengat.

B. Kendala dalam Implementasi pembebasan bersyarat di rumah tahanan negara kelas II B Rengat.

Mengenai Kendala-kendala yang dihadapi petugas pemsarakatan di Rumah Tahana Negara Klas II B Rengat dalam melaksanakan Implementasi pembebasan bersyarat terdapat beberapa hambatan yaitu: hambatan pada narapidana sendiri Kurangnya personil atau pegawai Rumah Tahanan Negara, Sarana dan prasarana Proses pengusulan memakan waktu yang lama, kendala dari pihak masyarakat atau keluarga

Namun pihak Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecilkan hambatan-hambatan yang ada memaksimalkan sumber daya manusia dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Rudinur, SH, Kepala Sub bagian seksi pelayanan Rumah tahanan Negara klas II B rengat, Hari kamis, tanggal 22 Agustus 2018, Jam 14.30 Wib, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Rengat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat, mengatakan bahwa jumlah petugas untuk menangani pengusulan persyaratan pembebasan bersyarat yang masih kurang karena banyaknya jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat yang berjumlah sekitar 578 sedangkan total petugas yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Rengat berjumlah sekitar 30 orang. Karena banyaknya yang mengajukan permohonan bersyarat dan kurangnya petugas bagian pembebasan bersyarat maka proses yang seharusnya tidak memakan waktu yang lama hanya 14 hari kerja Rumah Tahanan Negara, 14 hari kerja dikanwil dan 30 hari kerja di Ditjenpas sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP. Sedangkan hasil dilapangan masih memakan waktu cukup lama yaitu 30 hari kerja di Rumah Tahanan Negara. Karena kurangnya petugas dan banyaknya pengajuan pembebasan bersyarat membuat prosesnya berjalan lebih lama dari yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya negara Indonesia masih perlu mengkaji ulang undang-undang untuk mengawal dalam proses pembangunan negara maka masih perlu diperhatikan eksistensinya dalam susunan di Indonesia. Dengan

ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap narapidana supaya apabila kembali lagi ketengah masyarkat bisa menjadi lebih berkelakuan baik kepada masyarakat dan bisa di terima kembali oleh masyarakat tempat tinggal asal narapidana tersebut, pembebasan bersyarat masih sangat diperlukan untuk para narapidana supaya bisa kembali di tengah keluarga dan masyarakat supaya dengan adanya pembinaan dalam rumah tahanan naeagra bisa membuat perilaku narapidana menjadi lebih baik lagi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Pembebasan Bersyarat merupakan Hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, dari hasil lapangan sangat berbeda dengan undang-undang yang berlaku. mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, Akan tetapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih menjadi persoalan bagi petugas untuk pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di rutan klas IIB Rengat.
2. Mengenai kendala dalam Implementasi pembebasan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rudinur, SH, Kepala Sub bagian seksi pelayanan tahanan kemasyarakatan klas II B rengat, Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2018, Jam 14.30 Wib, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Rengat

bersyarat di rumah tahanan negara kelas II B Rengat. Pada narapidana itu sendiri dalam proses pembebasan bersyarat seringkali narapidana selalu berbuat ulah hal seperti berkelahi sesama narapidana, membawa hp dalam Rumah tahanan Negara kelas II B Rengat, Kurangnya jumlah personil petugas masyarakat atau pegawai yang menangani pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat, Peraturan perundang-undangan pembebasan bersyarat yang masih kurang berjalan dengan semestinya, Tidak adanya jaminan dari keluarga dan surat persetujuan dari kantor kelurahan tempat tinggal asal narapidana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pembahasan dan menarik kesimpulan maka kemudian saran dari penelitian ini adalah :

1. Agar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membeda-bedakan status warga binaan untuk menghindari penyelewengan, dalam pemberian pembebasan bersyarat, hendaknya jangka waktunya dapat dipersingkat, agar tidak terjadi pemberian keputusan pembebasan bersyarat yang telah lewat waktu dari tanggal bebas yang semestinya. Agar warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat memahami betul

fungsi dan tujuan diberikannya kepada klien pembebasan bersyarat sehingga tujuan pelaksanaannya optimal.

2. Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat yang terlalu lama dan rumit, seharusnya ditingkatkan lagi pelayanannya. Sehingga proses pembebasan bersyarat dapat dengan mudah ditempuh dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Soebani Beni, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Ali, Zaidin M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan kebijakkan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dipradja, Soema R.A.S dan Atmasamita, Romli, 1979, *Sistem Masyarakat di Indonesia*, Biratirta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Helsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa Media, Bandung.
- H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Zaainal, Asikin Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

Mahfud MD, 1988, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Beatrice Krebs, "Hong Kong Special Administrative Region v Chan Kam Shing [2016] HKCFA 87 (CFA (HK))". *Journal of Criminal Law*, Hong kong, 2017, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/33jebTU24/FullText.html>, google.com.

Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage": Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed? *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn.Ins. L.J.707, 1998-1999.

Effendi Erdianto, 2012, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1.

Erdianto Effendi, 2014, Meninjau Kembali Kebijakan

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak''.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan cuti Bersyarat, Lembaran Negara Nomor 282, Tahun 2018.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, diakses, tanggal, 20 juli 2018.

<https://www.google.co.id/search?q=teori+tujuan+pemidanaan&oq>, diakses, tanggal, 13 agustus 2018